



# BAB I

## PENDAHULUAN

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga RPJMD 2013 – 2018 Provinsi Kalimantan Timur, anggaran yang akan ditetapkan juga tidak dapat dirasakan faedahnya oleh masyarakat secara langsung, sehingga penting untuk sungguh-sungguh memahami kondisi Kalimantan Timur pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih diterus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu, dibutuhkan sebuah Perubahan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur.

### 1.1. LATER BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat 4 bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Adapun tujuan dari Penyusunan RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 adalah Menjadi menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2016 untuk menyusun RAPBD Tahun 2016.



Untuk memastikan bahwa tujuan di atas dapat tercapai maka dibutuhkan Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2016 yang merupakan evaluasi kegiatan yang selaras pada saat pelaksanaan program/kegiatan (sampai dengan triwulan I 2016) dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan perencanaan/target meliputi Pengukuran kinerja (output indikator ) dan Anggaran. APBD 2016 yang merupakan pelaksanaan RKPD 2016 disusun berdasarkan asumsi atas kondisi perekonomian yang terjadi sampai dengan triwulan pertama tahun 2016 dan proyeksi perubahan yang akan terjadi hingga akhir tahun 2016 Namun ketika pelaksanaan APBD 2016 berjalan hingga triwulan I, terjadi perubahan dari beberapa indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, realisasi PDRB dengan migas yang didominasi *lifting* minyak dan produksi batubara, tingkat inflasi, nilai ekspor impor daerah, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Daerah memiliki Sisa Lebih Perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2015, yang antara lain berasal dari sisa lebih realisasi anggaran dan over target penerimaan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, dan sejalan dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, Pemerintah Daerah menyusun Perubahan RKPD 2016 terlebih dahulu yang selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun Perubahan KUA-PPAS dan APBD tahun 2016 yang di dalamnya mencakup perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan anggaran. Selanjutnya dengan memperhatikan berbagai perkembangan beberapa indikator ekonomi makro RKPD 2016 juga perlu menyesuaikan terhadap perkembangan yang terjadi.

Perkembangan berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang berubah dari perkiraan semula, dan upaya pencapaian target sasaran RKPD 2016,



serta langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran belanja SKPD tahun 2016, menjadi latar belakang utama perlunya pengajuan Perubahan RKPD yang dilakukan berdasarkan penyampaian laporan pelaksanaan RKPD hingga Triwulan I. Perubahan RKPD 2016 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2016.

RKPD Perubahan 2016 merupakan paket kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk:

- a. Menjaga sustainabilitas fiskal (*fiscal sustainability*);
- b. Memperbaiki efisiensi ekonomi;
- c. Meningkatkan investasi untuk menstimulasi ekonomi;
- d. Menjaga daya beli masyarakat; dan
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. DASAR PENYUSANAN PERUBAHAN-RKPD**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

### **A. Undang-Undang**

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**B. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah.**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan H.M.Mukmin Faisyal HP, SH. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016.
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2016.

### **1.3. PERUBAHAN ASUMSI DASAR**

Penyesuaian RKPD Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan perkembangan dan perubahan keadaan, penyusunan perkiraan perubahan atas RKPD Tahun Anggaran 2016, apabila terjadi :

1. Perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKPD Tahun Anggaran 2016;
2. Perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan daerah;
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar jenis belanja;

4. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan

#### 1.3.1. APBNP TAHUN 2016

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan (APBNP) Tahun 2016 dilakukan revisi terhadap asumsi yang telah digunakan dalam APBN Tahun 2016 seperti pada tabel berikut :

**Tabel. 1.1**  
Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN dan APBNP Tahun 2016

INDIKATOR	2016	
	APBN	APBNP
a. Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy)	5.3	5.2
b. Inflasi (% ,yoy)	4.7	4.0
c. Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	5.5	5.5
d. Nilai Tukr (Rp/USD)	13,900	13,500
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	50	40
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)	830	820
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1,150	1,150

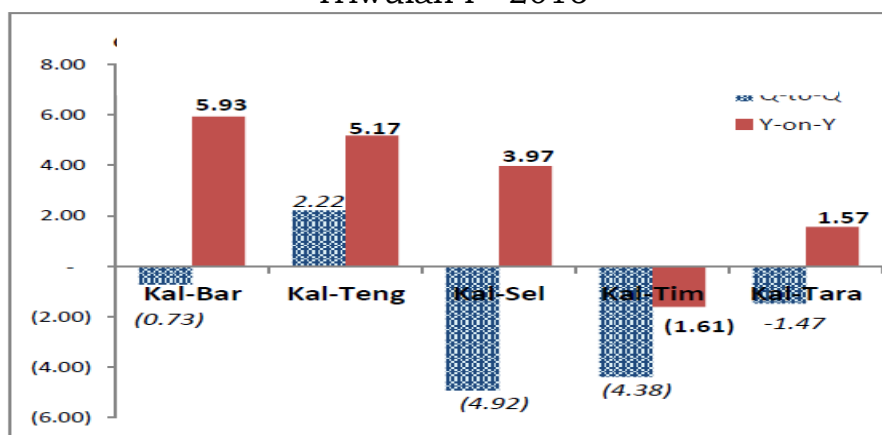
Dengan berubahnya asumsi makro yang digunakan pada APBNP Tahun 2016, maka pada KUPA Tahun 2016 ini mengikuti angka asumsi makro yang digunakan Pemerintah Pusat.

#### 1.3.2. PDRB PULAU KALIMANTAN

Dilihat kinerja ekonomi di Pulau Kalimantan secara umum pada Triwulan I - 2016 tumbuh 1,08 persen dibandingkan triwulan I-2015 (*y-on-y*). Sebaliknya jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*), kinerja ekonomi Pulau Kalimantan mengalami kontraksi sebesar negatif 3,09 persen. Diamati secara spasial, pertumbuhan ekonomi dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya menempatkan Kalimantan Barat dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 5,93 persen, diikuti Kalimantan Tengah (5,17 persen), Kalimantan Selatan (3,97 persen) dan Kalimantan Utara (1,57 persen), sebaliknya Kalimantan Timur

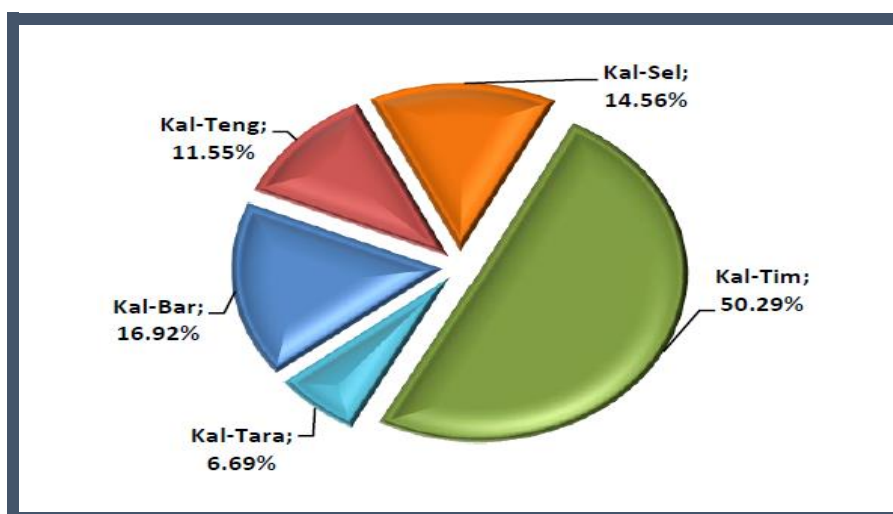
mengalami kontraksi sebesar negatif 1,61 persen. Namun jika dilihat struktur perekonomian Pulau Kalimantan pada Triwulan I-2016 didominasi oleh Kalimantan Timur sebesar 50,29 persen, diikuti Kalimantan Barat sebesar 16,92 persen, Kalimantan Selatan sebesar 14,56 persen, Kalimantan Tengah sebesar 11,55 persen dan Kalimantan Utara sebesar 6,69 persen.

**Gambar. 1.1.**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Kalimantan  
Triwulan I - 2016



Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur  
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I

**Gambar. 1.2.**  
Struktur Ekonomi Pulau Kalimantan Triwulan I – 2016



Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur  
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I





### 1.3.3. PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA KALIMANTAN TIMUR

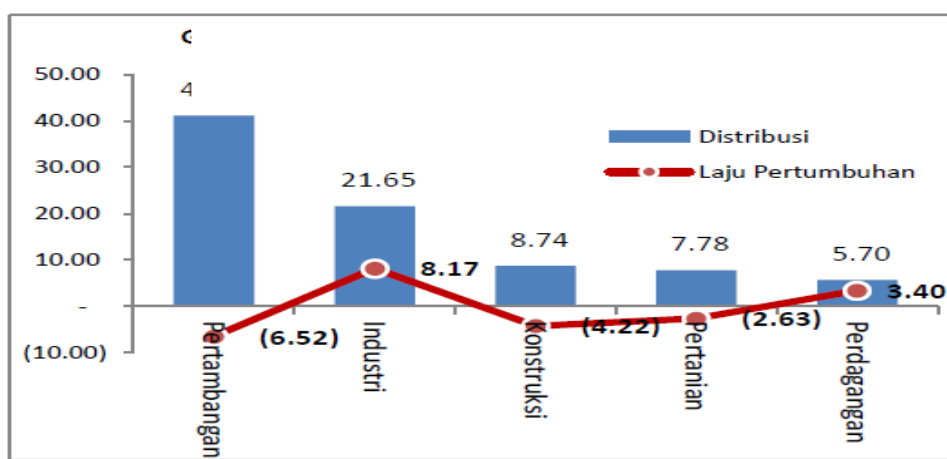
#### **Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I - 2016 Terhadap Triwulan I -2015 (y-on-y)**

Kinerja ekonomi Kalimantan Timur pada awal tahun 2016 ini belum sepenuhnya pulih dari krisis dan masih mengalami pelemahan seiring dengan kondisi perekonomian global yang masih terus dibayangkayangi situasi yang tidak menentu, khususnya masih melemahnya beberapa harga komoditas energi (migas dan batubara). Kelesuan ini tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan I- 2016 yang mengalami kontraksi - 1,61 persen dibanding Triwulan I-2015 (y-on-y).

Jika diamati menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2016 dipengaruhi oleh penurunan kinerja lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami koreksi sebesar negatif 6,52 persen, diikuti penurunan kinerja Jasa Perusahaan yang terkoreksi sebesar negatif 4,76 persen. Sama halnya dengan lapangan usaha Konstruksi juga terkoreksi sebesar negatif 4,22 persen serta lapangan usaha Pertanian sebesar negatif 2,63 persen.

#### **Gambar. 1.3.**

Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa lapangan Usaha, Triw.I-2016 (y-on-y)



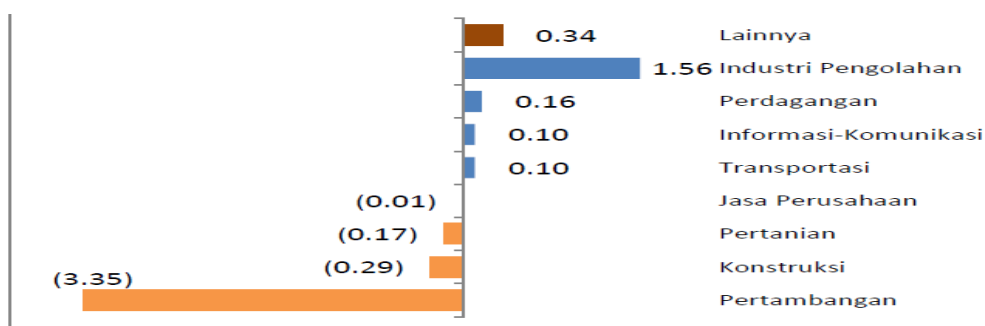
Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur  
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I



Meskipun lapangan usaha lainnya cenderung tumbuh positif, hal itu belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara keseluruhan. Sebagai gambaran, pada triwulan ini lapangan usaha yang tumbuh positif diantaranya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan sebesar 9,43 persen, tertinggi dibanding lapangan usaha lainnya, diikuti Jasa Lainnya yang tumbuh 8,93 persen dan Industri Pengolahan sebesar 8,17 persen.

Sementara itu, jika diamati sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2016 secara y-on-y, ternyata sumber pertumbuhan tertinggi pada triwulan ini berasal dari lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 1,56 persen, diikuti lapangan usaha Perdagangan sebesar 0,16 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,10 persen serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,10 persen. Selanjutnya lapangan usaha yang menyebabkan terperosoknya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2016 adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dan lapangan usaha Konstruksi dengan andil masing-masing -3,35 persen dan -0,29 persen dapat dilihat pada gambar 1.4.

**Gambar. 1.4.**  
Sumber Pertumbuhan PDRB  
Menurut lapangan Usaha, Triw.I-2016 (y-on-y)



Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur  
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I



**Tabel. 1.2.**  
PDRB Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		Triw.I-2015	Triw.IV-2015	Triw.I-2016	Triw.I-2015	Triw.IV-2015	Triw.I-2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.831,1	8.849,6	9.037,8	7.138,1	6.980,4	6.950,4
B	Pertambangan dan Penggalian	58.418,7	53.360,8	47.724,7	55.975,7	55.223,9	52.324,7
C	Industri Pengolahan	24.615,8	26.617,6	25.137,3	20.724,8	23.605,4	22.418,9
D	Pengadaan Listrik, Gas	37,9	53,6	48,7	45,7	54,4	49,0
E	Pengadaan Air	50,1	54,6	56,0	46,5	48,2	48,7
F	Konstruksi	10.228,8	10.542,8	10.152,6	7.571,9	7.717,6	7.252,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.005,4	6.661,2	6.617,2	5.143,6	5.369,4	5.318,3
H	Transportasi dan Pergudangan	4.186,5	4.505,8	4.571,6	2.950,0	3.033,8	3.058,5
I	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	1.019,8	1.091,8	1.097,7	770,1	799,3	797,8
J	Informasi dan Komunikasi	1.474,7	1.599,3	1.622,7	1.486,6	1.576,8	1.593,3
K	Jasa Keuangan	2.068,5	2.170,8	2.143,4	1.609,3	1.658,1	1.632,1
L	Real Estate	1.186,4	1.216,1	1.244,0	977,5	990,3	986,6
M,N	Jasa Perusahaan	276,0	270,8	272,4	218,1	213,4	207,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.574,3	3.307,0	2.859,6	1.880,5	2.222,7	1.953,6
P	Jasa Pendidikan	1.771,8	2.019,2	2.021,4	1.386,4	1.502,5	1.488,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	668,1	764,7	782,2	526,1	570,7	575,7
R,S T,U	Jasa Lainnya	629,5	722,7	738,6	487,7	527,7	531,2
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)</b>		<b>125.043,4</b>	<b>123.808,6</b>	<b>116.127,8</b>	<b>108.938,4</b>	<b>112.094,6</b>	<b>107.186,8</b>

Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur  
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I

**Tabel. 1.3.**

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010  
Triwulan I Tahun 2016 (Persen)

Lapangan Usaha		Q-to-Q		Y-on-Y		Sumber Pertumbuhan Y-on-Y
		Triw.IV-2015	Triw.I-2016	Triw.I-2015	Triw.I-2016	Triw.I-2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(2,04)	(0,43)	7,40	(2,63)	(0,17)
B	Pertambangan dan Penggalian	2,50	(5,25)	(1,94)	(6,52)	(3,35)
C	Industri Pengolahan	6,19	(5,03)	(5,25)	8,17	1,56
D	Pengadaan Listrik, Gas	14,46	(9,95)	40,33	7,37	0,00
E	Pengadaan Air	1,45	1,01	(0,44)	4,88	0,00
F	Konstruksi	0,74	(6,03)	0,71	(4,22)	(0,29)
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,80	(0,95)	0,68	3,40	0,16
H	Transportasi dan Pergudangan	0,84	0,81	4,14	3,68	0,10
I	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	1,52	(0,18)	5,83	3,60	0,03
J	Informasi dan Komunikasi	2,27	1,05	9,12	7,18	0,10
K	Jasa Keuangan	0,65	(1,56)	3,44	1,42	0,02
L	Real Estate	0,52	(0,37)	6,56	0,93	0,01
M,N	Jasa Perusahaan	(0,28)	(2,65)	(0,39)	(4,76)	(0,01)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,86	(12,11)	4,13	3,89	0,07
P	Jasa Pendidikan	2,28	(0,95)	12,14	7,35	0,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,77	0,88	14,15	9,43	0,05
R,S, T,U	Jasa Lainnya	3,02	0,67	8,61	8,93	0,04
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)</b>		<b>2,69</b>	<b>(4,38)</b>	<b>(0,85)</b>	<b>(1,61)</b>	<b>(1,61)</b>

Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur  
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I

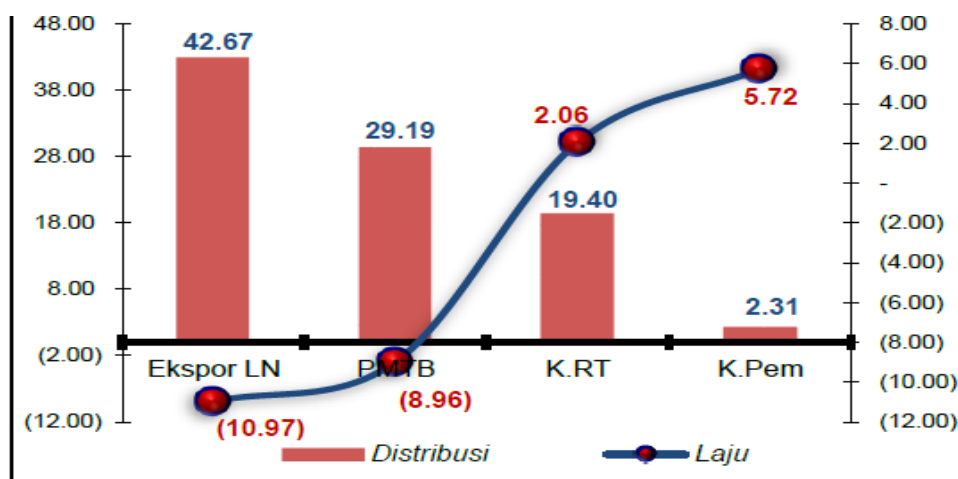
#### 1.3.4. PDRB MENURUT PENGELUARAN KALIMANTAN TIMUR

##### **Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I - 2016 Terhadap Triwulan I - 2015 (y-on-y)**

Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2016 yang terkoreksi sebesar negatif 1,61 persen dibandingkan

triwulan I-2015 lebih dipengaruhi oleh anjloknya pertumbuhan komponen ekspor Luar Negeri yang turun hingga negatif 10,97 persen, dimana komponen ini berkontribusi sebesar 42,67 persen terhadap PDRB Kalimantan Timur. Diikuti kinerja investasi yang digambarkan oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan ini juga terkoreksi sebesar negatif 8,96 persen. Meskipun komponen Net Ekspor Antar Daerah tumbuh signifikan sebesar 28,35 persen, namun kondisi tersebut secara umum belum mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada awal tahun 2016.

**Gambar. 1.5.**  
Pertumbuhan dan Distribusi  
Beberapa Komponen, Triw.I-2016 (y-on-y)



Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Timur  
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2016 dari sisi pengeluaran, komponen Net Ekspor Antar Daerah memberi andil sebesar 4,65 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (0,30 persen). Sebaliknya komponen Ekspor Luar Negeri memberi andil negatif 6,57 persen dan PMTB sebesar negatif 2,30 persen.



**Tabel. 1.4.**  
PDRB Menurut Pengeluaran  
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010(Miliar Rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw.I-2015	Triw.IV-2015	Triw.I-2016	Triw.I-2015	Triw.IV-2015	Triw.I-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	20.991,1	22.085,8	22.528,7	15.784,5	16.087,0	16.109,5
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	536,7	662,8	583,1	391,8	470,0	406,8
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.293,2	10.651,2	2.676,9	1.685,4	6.662,4	1.781,8
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	34.607,6	36.120,0	33.903,3	27.949,7	27.684,9	25.444,9
5 Perubahan Inventori	988,2	531,4	287,9	826,5	543,4	325,0
6 Ekspor Luar Negeri	69.532,5	59.169,6	49.550,8	65.217,4	61.022,8	58.062,0
7 Impor Luar Negeri	21.594,9	21.320,2	14.794,4	20.786,4	21.505,8	17.879,6
8 Net Ekspor Antar Daerah	17.689,0	15.908,0	21.391,5	17.869,5	21.129,8	22.936,2
<b>PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO</b>	<b>125.043,4</b>	<b>123.808,6</b>	<b>116.127,8</b>	<b>108.938,4</b>	<b>112.094,6</b>	<b>107.186,8</b>

Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur  
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I

**Tabel. 1.5.**  
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010  
Triwulan I Tahun 2016 (Persen)

Komponen	Q-to-Q		Y-on-Y		Sumber Pertumbuhan Y-on-Y
	Triw.IV-2015	Triw.I-2016	Triw.I-2015	Triw.I-2016	Triw.I-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	(0,23)	0,02	0,94	2,06	0,30
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,02	(0,06)	(8,42)	3,85	0,01
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,63	(4,35)	17,03	5,72	0,09
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	(1,96)	(2,00)	(0,13)	(8,96)	(2,30)
5 Perubahan Inventori	(0,21)	(0,19)	(50,56)	(60,67)	(0,46)
6 Ekspor Luar Negeri	(2,82)	(2,64)	(9,11)	(10,97)	(6,57)
7 Impor Luar Negeri	(0,78)	(3,23)	11,44	(13,98)	(2,67)
8 Net Ekspor Antar Daerah	4,49	1,61	85,90	28,35	4,65
<b>PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO</b>	<b>2,69</b>	<b>(4,38)</b>	<b>(0,85)</b>	<b>(1,61)</b>	<b>(1,61)</b>

Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur  
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I



### 1.3.5. Inflasi..

Perubahan Indek Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat Inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk Provinsi Kalimantan Timur, dua kota yang dihitung inflasi yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada lima kelompok pengeluaran, yaitu kelompok sandang mengalami Inflasi **0,48** persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami Inflasi sebesar **0,29** persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami Inflasi **0,28** persen, kenaikan indeks pada kelompok transportasi dan komunikasi sebesar **0,05** persen dan kelompok perumahan mengalami Inflasi sebesar **0,001** persen. Sedangkan kelompok bahan makanan dan kelompok kesehatan justru mengalami Deflasi yaitu masing-masing sebesar **-0,13** persen dan **-0,01** persen.

**Tabel. 1.6.**  
Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi  
Kalimantan Timur Bulan Mei 2016 (persen)

No	Kelompok Pengeluaran	Andil Inflasi (%)
1	Bahan Makanan	-0,02
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0,06
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,00
4	Sandang	0,03
5	Kesehatan	-0,001
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	0,02
7	Transportasi dan Komunikasi	0,0
	Umum	0.09

Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur  
Perkembangan IHK/Inflasi Kalimantan Timur Triwulan I



Pada bulan Mei 2016 kelompok pengeluaran yang memiliki andil yang dominan terhadap Inflasi Kalimantan Timur adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memiliki andil sebesar **0,06** persen, kelompok sandang memiliki andil **0,03** persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yaitu **0,02** persen, kelompok transportasi dan komunikasi memiliki andil sebesar **0,01** persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memiliki andil yang sangat kecil. Kelompok bahan makanan dan kelompok kesehatan memiliki andil negatif yaitu masing-masing sebesar - **0,02** persen dan **-0,001** persen.

Pada bulan Mei tahun 2016 Kalimantan Timur mengalami Inflasi sebesar **0,09** persen. Sedangkan pada periode yang sama dua tahun sebelumnya, yaitu pada Mei 2015 Kalimantan Timur mengalami Inflasi **0,41** persen dan pada Mei 2014 mengalami Inflasi sebesar **0,23** persen. Inflasi tahun kalender sampai dengan bulan Mei 2016 tercatat sebesar **0,41** persen, pada Mei 2015 tercatat sebesar **1,14** persen dan pada Mei 2014 sebesar **1,81** persen. Inflasi *year on year* Kalimantan Timur bulan Mei 2016 sebesar **4,25** persen. Sementara Inflasi *year on year* periode dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 sebesar **6,95** persen dan tahun 2014 sebesar **8,36** persen.

**Tabel. 1.7.**

Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year  
Kalimantan Timur Bulan Mei 2016 Tahun 2014-016 (persen)

No	Inflasi	2014	2015	2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mei	0.23	0.41	0.09
2	Mei (tahun kalender)	1.81	1.14	0.41
3	Mei (year on year)	8.36	6.95	4.25

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Timur  
Perkembangan IHK/Inflasi Kalimantan Timur Triwulan I



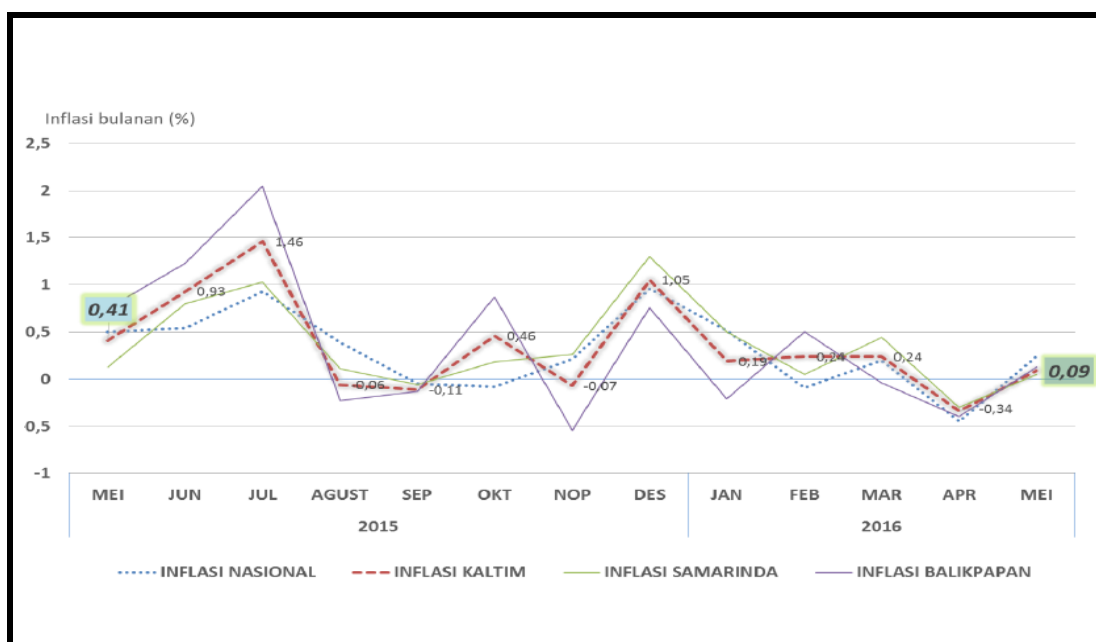


Jika dirinci menurut kota, pada bulan Mei 2016, Kota Samarinda mengalami Inflasi **0,05** persen dengan IHK **126,22**. Sedangkan Kota Balikpapan mengalami Inflasi **0,13** persen dengan IHK **126,33**. Sampai dengan bulan Mei 2016 Inflasi tahun kalender Kota Samarinda sebesar **0,74** persen, sedangkan Kota Balikpapan masih Deflasi **-0,02** persen. Sementara itu Inflasi *year on year* bulan Mei 2016 untuk Kota Samarinda sebesar **4,43** persen dan Kota Balikpapan sebesar **4,02** persen.

Inflasi *year on year* Kota Samarinda bulan Mei 2016 sebesar **4,43** persen, pada periode yang sama dua tahun sebelumnya masing-masing tercatat sebesar **5,88** persen dan **8,76** persen. Kemudian Inflasi *year on year* Kota Balikpapan bulan Mei 2016 tercatat sebesar **4,02** persen, dan dua tahun sebelumnya Inflasi *year on year* masing-masing sebesar **7,39** persen dan **7,66** persen.

**Gambar. 1.6.**

Grafik Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional  
Bulan Mei 2015 – Mei 2016



Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Timur  
Perkembangan IHK/Inflasi Kalimantan Timur Triwulan I



#### **1.4. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

##### *1.4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan Dilakukan pada Perubahan APBD TA. 2016*

Perubahan kebijakan anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bersumber dari pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, Lain-lain pendapatan Daerah yang sah dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil kebijakan strategis untuk menggali potensi daerah sebagai penerimaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai urusannya dan diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran pembangunan daerah pada Kebijakan Umum APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 memberikan gambaran anggaran pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tambahan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sistem anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, dimana pendapatan daerah tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dicapai untuk setiap sumber pendapatan sehingga dalam penetapan target pendapatan harus diestimasikan secara cermat dan berhati-hati karena dapat berdampak pada sisi anggaran belanja.

Perhitungan proyeksi pendapatan mengalami penurunan dari Target Pendapatan APBD 2016 Murni, hal ini disebabkan penyesuaian target penerimaan dengan kondisi ekonomi serta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator ekonomi makro yang telah dilakukan perubahan oleh pemerintah adalah menurunkan target pertumbuhan ekonomi,



menurunkan asumsi lifting dan harga migas (Indonesian Crude Price) serta kurs rupiah terhadap dollar yang secara pasti akan mempengaruhi perekonomian daerah.

*1.4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.*

Penurunan target pendapatan pada P-APBD 2016 di dominasi oleh Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan pendapatan diprediksi sebesar Rp.9.102.801.847.108,49 menurun sebesar Rp.1.194.122.462.891,51 atau turun 11,60% dari target pendapatan tahun 2016 murni yaitu sebesar Rp.10.296.924.310.000,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.4.066.578.807.110,59, Dana Perimbangan sebesar Rp.5.008.040.992.397,90 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.28.182.047.600,00 serta Pembiayaan Daerah sebesar Rp.226.826.272.891,51, sehingga total penerimaan daerah sebesar Rp.9.329.628.120.000,00.

Dana Alokasi Khusus mengalami pengurangan sebesar Rp.34.864.133.000,00 semula sebesar Rp.1.011.082.810.000,00 menjadi Rp.976.218.677.000,00 dibandingkan target APBD 2016. Sementara, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Provinsi Kalimantan Timur tetap yaitu sebesar Rp.80.402.179.000,00.

Komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah khususnya komponen Pendapatan Pajak Daerah menurun sebesar Rp.944.000.000.000,00 atau turun 23,53% dari target tahun 2016 murni sebesar Rp.4.012.255.300.000,00 menjadi Rp.3.068.255.300.000,00 pada P-APBD 2016. Tetapi pada komponen penerimaan Retribusi Daerah, target APBD 2016 Murni sebesar Rp.12.996.200.000,00 meningkat sebesar Rp.2.903.210.000,00 atau naik 22,34% menjadi Rp.15.899.410.000,00. Pendapatan pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar menurun sebesar



Rp.123.081.087.889,41 atau 42,55% dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.289.251.210.000,00 menjadi sebesar Rp.166.170.122.110,59 pada P-APBD 2016. Sedangkan penerimaan pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp.41.248.515.000,00 atau naik 5,32% dari penerimaan tahun 2016 sebesar Rp.775.005.460.000,00 menjadi sebesar Rp.816.253.975.000,00.

#### *1.4.3. Pendapatan Asli Daerah*

Penerimaan dari PAD yang terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Secara keseluruhan target PAD pada P-APBD 2016 Murni ditargetkan sebesar Rp.4.066.578.807.110,59, menurun sebesar sebesar Rp.1.022.929.362.889,41 atau turun 20,10% dari target Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun 2016 sebesar Rp.5.089.508.170.000,00.

##### **a. Pajak Daerah**

Target Penerimaan P-APBD 2016 pada Pajak Daerah secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp.3.068.255.300.000,00 turun sebesar Rp.944.000.000.000,00 atau turun 23,53% dari target APBD 2016 Murni yaitu Rp.4.012.255.300.000,00. Penurunan target Pajak Daerah tersebut bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

##### **1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Target penerimaan PKB P-APBD 2016 sama dengan target pada APBD 2016 Murni yaitu sebesar Rp.760.000.000.000,00.

##### **2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Target APBD 2016 Murni sebesar Rp.850.000.000.000,00 dan pada target perubahan menjadi sebesar Rp.750.000.000.000,00.



Mengalami penurunan sebesar Rp.100.000.000.000,00 atau (11,76%). Pengaruh penurunan tersebut karena:

1. Terjadi penurunan penjualan unit kendaraan bermotor baru dibanding penjualan kendaraan tahun 2015 hal ini dapat dilihat dari penjualan triwulan pertama di tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 30% dibanding penjualan triwulan 1 tahun 2015
2. Penurunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 11% dibanding Tahun 2015
3. Berkurangnya daya beli masyarakat karena situasi ekonomi makro.
4. Turunnya harga batu bara yang sangat signifikan, yang mengakibatkan pembelian kendaraan bermotor baru sangat berkurang khususnya alat berat/besar.
5. Mekanisme pemungutan BBNKB dan PKB Alat berat masih belum melalui mekanisme Samsat, sehingga dapat menghambat proses pendataan maupun pemungutan BBNKB dan PKB Alat Berat.
6. Adanya kendaraan baru luar daerah yang masuk ke wilayah Kaltim, dikarenakan harga jual kendaraan luar daerah khususnya Pulau Jawa jauh lebih rendah, baik harga jual maupun tarif BBNKB

### **3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**

Target APBD 2016 Murni sebesar Rp.2.245.000.000.000,00 dan pada target P-APBD 2016 sebesar Rp.1.400.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.845.000.000.000,00 atau (37,64%) dengan penjelasan sebagai berikut:



1. Menurunnya rencana penerimaan pada APBD Perubahan 2016 dibandingkan realisasi Tahun 2015 disebabkan melemahnya Iklim Investasi Usaha khususnya di Sektor Tambang yang menggunakan Kendaraan Bermotor sebagai sarana vital penggerak kegiatan tambang.
2. Menurunnya penggunaan BBM Solar Industri sebesar 29,04% dibandingkan tahun 2015 dikarenakan banyaknya perusahaan tambang batubara yang tutup dan menurunnya jumlah produksi batubara.
3. Asumsi harga solar yang digunakan pada saat penyusunan APBD 2016 Murni menggunakan harga solar Rp 11.370,-/liter posisi harga pada awal tahun 2015 sedangkan asumsi harga yang digunakan pada tahun 2016 perubahan adalah Rp. 6.963,-/liter atau terjadi penurunan harga sebesar 38,76%.

#### **4) Pajak Air Permukaan**

Target APBD 2016 Murni sebesar Rp.6.500.000.000,00 dan pada target P-APBD sebesar Rp.7.500.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.000.000.000,00 atau 15,38%, Kenaikan penerimaan PAP tersebut dipengaruhi oleh:

1. Pelaksanaan intensifikasi di lapangan semakin optimal oleh petugas UPTD.
2. Adanya peningkatan penggunaan air permukaan dari PDAM.

#### **5) Pajak Rokok**

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.150.755.300.000,00 tidak mengalami perubahan.

#### **b. Retribusi Daerah**

Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD 2016 Murni ditargetkan Rp.12.996.200.000,00, mengalami peningkatan sebesar



Rp.2.903.210.000,00 menjadi Rp.15.899.410.000,00 atau naik 22,34% yang terdiri dari 3 (tiga) komponen penerimaan yaitu:

**1) Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum diatur dengan Peraturan Daerah Nomor: 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Target APBD 2016 Murni Rp.5.877.500.000,00 dan pada P-APBD 2016 ditargetkan Rp.7.891.210.000,00 atau meningkat sebesar Rp.2.013.710.000,00 atau naik 34,26%.

**2) Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Daerah Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Target APBD 2016 Murni Rp.6.049.400.000,00 sedangkan untuk P-APBD 2016 ditetapkan Rp.6.928.400.000,00, meningkat sebesar Rp.879.000.000,00 atau naik 14,53%.

**3) Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Target APBD 2016 Murni Rp.1.069.300.000,00 sedangkan untuk target P-APBD 2016 Rp.1.079.800.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.10.500.000,00 atau naik 0,98%. Peningkatan ini dikarenakan adanya penerimaan retribusi baru yaitu retribusi perpanjangan IMTA.

**c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.**

Target pada APBD 2016 Murni Rp.289.251.210.000,00 dan pada P-APBD 2016 menjadi Rp.166.170.122.110,59 atau menurun sebesar Rp.123.081.087.889,41 atau turun (42,55%).

Pendapatan dari sektor ini merupakan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah dan Perusahaan Milik swasta yang terdiri dari:



**1) Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) Prov Kaltim**

Target pada APBD 2016 Murni Rp.650.000.000,00 dan pada P-APBD 2016 menjadi Rp.0,00 atau turun (100,00%) sebesar Rp.650.000.000,00.

**2) Perusda Kehutanan Prov. Kaltim**

Target pada APBD 2016 Murni sebesar Rp.36.000.000,00 tidak mengalami perubahan pada P-APBD 2016.

**3) PT. Agro Kaltim Utama**

Target pada APBD 2016 Murni sebesar Rp.500.000.000,00 menjadi Rp.300.000.000,00 pada P-APBD 2016 atau mengalami penurunan (40%) atau sebesar Rp.200.000.000,00.

**4) Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera Prov. Kaltim**

Terdapat kenaikan target sebesar Rp.7.087.104.374,00 atau 56,70% dari target APBD 2016 Murni Rp.12.500.000.000,00 menjadi Rp.19.587.104.374,00 pada target P-APBD 2016.

**5) Bank Pembangunan Daerah**

Target pada APBD 2016 Rp.266.903.410.000,00 menurun pada target P-APBD 2016 yaitu Rp.134.973.994.233,00 atau menurun sebesar Rp.131.929.415.766,26 atau turun (49,43%). Pemberian bunga deposito telah didasarkan pada hasil Tahun 2015 yang telah disepakati bersama oleh seluruh Kepala Daerah Kab/Kota. Pemberian deviden dipengaruhi oleh pencapaian laba dimana dua tahun terakhir kondisi ekonomi makro mengalami penurunan yang berdampak pada perekonomian regional Kaltim khususnya kondisi Bisnis Bankaltim.

**6) Perusda Ketenagalistrikan**

Terjadi penurunan terget sebesar Rp.516.737.418,00 atau turun (46,48%) dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.1.111.800.000,00 menjadi Rp.595.062.582,00 pada P-APBD 2016 dikarenakan adanya investasi pada KIPi Maloy.





**7) PT. Migas Mandiri Pratama**

Merupakan Bidang Usaha meliputi Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi serta kegiatan Penunjang lainnya. PT. Migas Mandiri Pratama menaikkan target pada P-APBD 2016 menjadi Rp.6.000.000.000,00 dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.4.750.000.000,00 atau naik sebesar Rp.1.250.000.000,00 atau 26,32%.

**8) Jamkrida**

Merupakan Bidang Usaha yang menambahkan target pada P-APBD 2016 Rp.334.253.439,00 yang pada APBD 2016 Murni tidak ditargetkan.

**d. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga**

Bagian laba atas penyertaan modal pada pihak ketiga :

- 1) Parkir Mall Lembusuana, tidak ditargetkan pada APBD 2016 Murni dan pada P-APBD 2016 ditargetkan sebesar Rp.1.100.000.000,00.
- 2) **PT.Asuransi Bangun Askirinda**, Target yang ditetapkan pada APBD 2016 Murni Rp.2.800.000.000,00, mengalami penambahan target pada P-APBD 2016 sebesar Rp.443.707.481,00 atau naik 15,85% menjadi Rp.3.243.707.481,00.

**e. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Target Penerimaan pada P-APBD 2016 dari komponen ini ditargetkan sebesar Rp.816.253.975.000,00 meningkat sebesar Rp.41.248.515.000,00 atau naik 5,32% dari target penerimaan APBD 2016 Murni Rp.775.005.460.000,00.

Rincian dari komponen ini adalah sebagai berikut:

**1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan**

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.4.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan.



**2) Penerimaan Jasa Giro,**

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.4.271.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

**3) Penerimaan Bunga Deposito,**

Pada APBD 2016 Murni ditargetkan Rp.136.900.000.000,00 dan pada P-APBD 2016 menjadi Rp.50.000.000.000,00, menurun sebesar Rp.86.900.000.000,00 atau turun 63,48%. Hal ini disebabkan penempatan deposito oleh Pemprov Kaltim mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya dikarenakan jumlah saldo kas daerah yang ditempatkan di BPD Kaltim menurun cukup signifikan.

**4) Penerima TP/ Tuntutan Ganti Rugi,**

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.7.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

**5) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.1.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

**6) Penerimaan Denda Pajak,**

Target penerimaan denda Pajak meningkat sebesar Rp.750.000.000,00 atau naik 1.55%, semula pada APBD 2016 Murni Rp.48.406.470.000,00 menjadi Rp.49.156.470.000,00. Hal ini disebabkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sudah mulai meningkat.

**7) Penerimaan Denda Retribusi**

Target APBD 2016 Murni Rp.26.000.000,00 meningkat pada P-APBD 2016 menjadi Rp.60.000.000,00 atau meningkat sebesar Rp.34.000.000,00 atau 130,77%.

**8) Penerimaan Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga**

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.560.290.000,00 tidak mengalami perubahan.



### **9) Penerimaan Dari Pengembalian**

Target pada P-APBD 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp.23.400.000.000,00 atau naik 29,24% dari target APBD 2016 Murni Rp.80.034.700.000,00 menjadi Rp.103.434.700.000,00.

### **10) Penerimaan BLUD**

Target BLUD pada P-APBD 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp.103.964.515.000,00 atau naik 20,82% dari target APBD 2016 Murni Rp.499.300.000.000,00 menjadi Rp.603.264.515.000,00.

#### *1.4.4. Dana Perimbangan*

Secara umum target penerimaan dana perimbangan pada P-APBD 2016 mengalami penurunan sebesar Rp.178.805.147.602,10 atau turun 3,45%, dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.5.186.846.140.000,00 menjadi Rp.5.008.040.992.397,90.

#### **a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak**

##### **1) Dana Bagi Hasil Pajak**

##### **1. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan**

Target APBD 2016 Murni sebesar Rp.505.000.000.000,00 dan pada P-APBD 2016 Rp.352.257.554.539,00 mengalami penurunan sebesar Rp.152.742.445.461,00 atau turun 30,25%. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan luasan wilayah tambang, tidak adanya penambahan luasan pengelolaan Kawasan Hutan, menurunnya produksi Migas sebagai salah satu sumber PBB (PBB Tubuh Bumi), serta tidak ada perubahan NJOP sebagai dasar penetapan pajak.

##### **2. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasil PPh 21, PPh Badan**

Penerimaan DBH PPh pada APBD 2016 Murni ditetapkan Rp.378.000.000.000,- berkurang sebesar Rp.70.250.197.600,00 atau turun 18,58% sehingga target P-APBD 2016 menjadi Rp.307.749.802.400,00. Hal ini disebabkan perhitungan



menurunnya potensi PPh sebagai akibat meningkatnya angka PHK, serta kenaikan PTKP dari Rp. 24 juta menjadi Rp. 30 juta (hingga awal Juni 2016), bahkan sejak akhir Juni PTKP naik menjadi Rp. 54 Juta.

## **2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak**

Target Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang terdiri dari penerimaan PSDH, IIUPH, Landrent, Royalty, Minyak Bumi dan Gas Bumi P-APBD 2016 menurut Alokasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.291.412.779.458,90 mengalami penyesuaian sebesar Rp.79.051.628.458,90 atau naik 2,46% dibandingkan APBD 2016 Murni sebesar Rp. 3.212.361.151.000,00.

### **b. Dana Alokasi Umum**

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.80.402.179.000,00 tidak mengalami perubahan.

### **c. Dana Alokasi Khusus**

Penerimaan Dana Alokasi Khusus pada P-APBD 2016 mengalami penurunan sebesar Rp.34.864.133.000,00 atau 3,45% sehingga rencana penerimaan menjadi Rp.976.218.677.000,00 dari target APBD 2016 Murni Rp.1.011.082.810.000,00. Hal ini disebabkan adanya pemotongan alokasi DAK Fisik oleh Pemerintah Pusat sebesar 10%.

#### *1.4.5. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah*

Target penerimaan sektor ini pada P-APBD 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp.7.612.047.600,00 atau 37,01%, dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.20.570.000.000,00 menjadi Rp.28.182.047.600,00. Rincian dari penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:



**a. Pendapatan Hibah**

Target APBD 2016 Murni sebesar Rp.15.570.000.000,00 dan pada target P-APBD 2016 sebesar Rp.23.182.047.600,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.7.612.047.600,00 atau 48,89%.

**b. Dana Insentif Daerah**

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.5.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

*1.4.6. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target*

Upaya meningkatkan penerimaan pendapatan dilakukan melalui :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada wajib pajak maupun wajib retribusi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengolahan aset untuk meningkatkan pendapatan ;
- d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dan konsisten di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Teknis, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kejaksaan, Unsur Pengawas Internal dan Eksternal;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.



**Tabel 1.8.**  
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	APBD 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)*100
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>10,296,924,310,000.00</b>	<b>9,102,801,847,108.49</b>	<b>(1,194,122,462,891.51)</b>	<b>(11.60)</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5,089,508,170,000.00</b>	<b>4,066,578,807,110.59</b>	<b>(1,022,929,362,889.41)</b>	<b>(20.10)</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4,012,255,300,000.00	3,068,255,300,000.00	(944,000,000,000.00)	(23.53)
1.1.2	Retribusi Daerah	12,996,200,000.00	15,899,410,000.00	2,903,210,000.00	22.34
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	289,251,210,000.00	166,170,122,110.59	(123,081,087,889.41)	(42.55)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	775,005,460,000.00	816,253,975,000.00	41,248,515,000.00	5.32
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>5,186,846,140,000.00</b>	<b>5,008,040,992,397.90</b>	<b>(178,805,147,602.10)</b>	<b>(3.45)</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	4,095,361,151,000.00	3,951,420,136,397.90	(143,941,014,602.10)	(3.51)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	80,402,179,000.00	80,402,179,000.00	-	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1,011,082,810,000.00	976,218,677,000.00	(34,864,133,000.00)	(3.45)
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG S</b>	<b>20,570,000,000.00</b>	<b>28,182,047,600.00</b>	<b>7,612,047,600.00</b>	<b>37.01</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	15,570,000,000.00	23,182,047,600.00	7,612,047,600.00	48.89
1.3.4	Dana Insentif Daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	0.00

## 1.5. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### 1.5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Pada hakekatnya dasar Perubahan RKPD tahun 2016 adalah penyesuaian APBD 2016 Murni dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan karena :

- a. Megakomodir Penyesuaian/Pengurangan Belanja berkenaan dengan Defisit Anggaran;



- b. Belanja BLUD Atas Tambahan Pendapatan BLUD 2016;
- c. Belanja BLUD Atas Penerimaan Pembiayaan (SiLPA BLUD Tahun 2015);
- d. Pemanfaatan Dana Sisa Lelang Tahun 2016;
- e. Penyesuaian Sisa DAK Tahun 2016;
- f. Penyesuaian Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota Atas Penurunan Penyesuaian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016 dan Kekurangan Bagi Hasil Pajak APBD 2016 Murni;
- g. Penyesuaian Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS 2016;
- h. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;
- i. Penyesuaian Hibah;
- j. Pembayaran Putusan MA tentang Lahan Somber Balikpapan;
- k. Pembayaran Utang Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2015 sesuai SK Gubernur No.900/K.105/2016;
- l. Belanja Langsung SKPD Prioritas dalam rangka memenuhi pendanaan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013;
- m. Pembayaran Eskalasi;
- n. Penyesuaian Belanja Langsung Prioritas SKPD.

Perubahan pokok-pokok kebijakan daerah mempunyai implikasi pada penurunan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menjaga kredibilitas pelaksanaan APBD tahun 2016.

Dengan memperhitungkan berbagai perubahan langkah-langkah kebijakan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang berpengaruh cukup signifikan terhadap berbagai besaran belanja yang berimplikasi pada belanja daerah, baik pada alokasi terhadap berbagai belanja daerah maka anggaran Belanja Daerah dalam P-APBD Tahun 2016 diperkirakan menjadi Rp.9,327 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp.1,769 triliun dibandingkan dengan APBD 2016 Murni sebesar Rp.11,096 triliun atau berkurang sebesar 15,94%.



*1.5.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga*

Kebijakan Perubahan terhadap Belanja Tidak Langsung didasarkan beberapa kriteria antara lain:

- a. Penyesuaian Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota Atas Penurunan Penyesuaian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016 dan Kekurangan Bagi Hasil Pajak APBD 2016 Murni;
- b. Penyesuaian Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS 2016;
- c. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;
- d. Penyesuaian Hibah;
- e. Pembayaran Putusan MA tentang Lahan Sember Balikpapan;
- f. Pembayaran Utang Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2015 sesuai SK Gubernur No.900/K.105/2016;

Dengan demikian, Belanja Tidak Langsung pada Rancangan P-APBD 2016 ditargetkan Rp.5,059 triliun, berkurang Rp.750,40 milyar atau turun 12,92% dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.5,809 triliun dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Dilakukan Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan sehingga alokasi pada P-APBD 2016 menjadi Rp.1,051 triliun, berkurang sebesar Rp.1,75 milyar atau turun 0,17% dari APBD 2016 Murni sebesar Rp.1,052 triliun.

2) Belanja Hibah

Penyesuaian pada Belanja Hibah pada P-APBD 2016 sebesar Rp.5,64 milyar atau naik sebesar 0,48% dibanding pada APBD 2016 Murni sebesar Rp.1,171 triliun menjadi Rp.1,176 triliun.

3) Belanja Bantuan Sosial

Penyesuaian Belanja Bantuan Sosial sehingga alokasi pada P-APBD 2016 menjadi Rp.3,87 milyar, berkurang sebesar Rp.2,08





milyar atau turun 35,00% dari APBD 2016 Murni sebesar Rp.5,95 milyar.

4) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota

Penyesuaian Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sehingga anggaran pada P-APBD 2016 menjadi Rp.1,542 triliun, berkurang sebesar Rp.556,10 milyar atau turun 26,50% dari APBD 2016 Murni sebesar Rp.2,098 triliun.

5) Belanja Tidak Terduga

Penyesuaian Belanja Tidak Terduga sehingga alokasi pada P-APBD 2016 menjadi Rp.13,00 milyar, berkurang sebesar Rp.7,00 milyar atau turun 35,00% dari APBD 2016 Murni sebesar Rp.20,00 milyar.

*1.5.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah*

Kebijakan terkait Kebijakan dan Prioritas Nasional adalah:

1. Pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.07/2016 sebesar 10% dari DAK Fisik sebesar Rp.34.864.133.000,00 sehingga alokasi DAK pada P-APBD 2016 Rp.976.218.677.000,00 dari APBD 2016 Murni Rp.1.011.082.810,00.

*1.5.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah*

Kebijakan Perubahan terhadap Belanja Langsung didasarkan beberapa kriteria antara lain:

1. Belanja BLUD Atas Tambahan Pendapatan BLUD 2016;
2. Belanja BLUD Atas Penerimaan Pembiayaan (SiLPA BLUD Tahun 2015);



3. Pemanfaatan Dana Sisa Lelang Tahun 2016;
4. Penyesuaian Sisa DAK Tahun 2016;
5. Belanja Langsung SKPD Prioritas dalam rangka memenuhi pendanaan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013;
6. Pembayaran Eskalasi;
7. Penyesuaian Belanja Langsung Prioritas SKPD.

Sehingga Belanja Langsung SKPD pada Rancangan P-APBD 2016 berkurang sebesar Rp.1,018 triliun atau turun 19,27% menjadi Rp.4,268 triliun dari APBD 2016 Rp.5,287 triliun.

## **1.6. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

### *1.6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan*

Kebijakan pada Pembiayaan Daerah disebabkan karena:

- 1) Belanja BLUD Atas Penerimaan Pembiayaan (SiLPA BLUD APBD 2015);
- 2) Pembayaran Putusan MA tentang Lahan Somber Balikpapan;

Penerimaan Pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp.573,17 milyar atau (71,65%) menjadi Rp.226,826 milyar dibanding APBD 2016 Murni sebesar Rp.800,00 milyar.

### *1.6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan*

Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan P-APBD 2016 yakni Pembayaran Putusan MA tentang Lahan Somber Balikpapan sebesar Rp.2,00 milyar.

**Tabel 1.9**

Plafon anggaran sementara perubahan untuk belanja pegawai,  
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,  
bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga  
Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	APBD 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)*100
<b>2.1</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5,809,876,200,000.00</b>	<b>5,059,135,909,230.00</b>	<b>(750,740,290,770.00)</b>	<b>(12.92)</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1,052,777,951,000.00	1,051,024,951,000.00	(1,753,000,000.00)	(0.17)
2.1.4	Belanja Hibah	1,171,123,100,000.00	1,176,767,200,000.00	5,644,100,000.00	0.48
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5,954,000,000.00	3,870,100,000.00	(2,083,900,000.00)	(35.00)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	2,098,380,349,000.00	1,542,278,710,000.00	(556,101,639,000.00)	(26.50)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Kabupaten/Kota & Partai Politik	1,461,640,800,000.00	1,272,194,948,230.00	(189,445,851,770.00)	(12.96)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	20,000,000,000.00	13,000,000,000.00	(7,000,000,000.00)	(35.00)

**Tabel 1.10**

Plafon anggaran sementara perubahan untuk Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	APBD 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>800,000,000,000.00</b>	<b>224,826,272,891.51</b>	<b>(575,173,727,108.49)</b>
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>800,000,000,000.00</b>	<b>226,826,272,891.51</b>	<b>(573,173,727,108.49)</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	800,000,000,000.00	226,826,272,891.51	(573,173,727,108.49)
<b>3.2</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	-	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>2,000,000,000.00</b>
3.2.2	Pembayaran Putusan MA tentang Lahan Somber Balikpapan	-	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

